BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Kasus Hutan
Edisi : 30 APRIL 2008
Hari : RABU
Hal. : 15

Kasus Alih Hutan Meluas

KPK Tetapkan Tersangka Baru dari Anggota DPR

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan penyidikan kasus suap dalam alih fungsi hutan, yang diduga melibatkan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat. KPK pun menyidik pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi pelabuhan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto saat dikonfirmasi Kompas, Selasa (29/4), mengatakan, KPK juga menyidik kasus alih fungsi hutan di Sumsel itu. Barang bukti kasus itu juga diperoleh KPK dalam penggeledahan di Gedung DPR, Senin lalu.

"Kasus itu memang benar telah dinaikkan ke tingkat penyidikan," jelas Bibit. Penggeledahan di Gedung DPR semula diarahkan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan suap kepada anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution, terkait alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Amin dan Sekretaris Daerah Bintan Azirwan ditangkap pada 9 April lalu.

Saat ditanyakan apakah tersangka dalam kasus alih fungsi hutan mangrove di Sumsel itu juga anggota Komisi IV DPR, Bibit menjawab, "Indikasinya memang begitu."

Sehari sebelumnya, KPK memeriksa istri Al Amin, Kristina, terkait kasus alih fungsi hutan di Sumsel. Menurut Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, di Banyuasin terjadi pengalihan fungsi hutan mangrove jadi pelabuhan.

Hutan mangrove seluas 1.200 hektar itu dipakai untuk Pelabuhan Tanjungapi-api seluas 600 hektar. Menteri Kehutanan MS Kaban menyetujui tukar guling lahan itu setelah mendapat persetujuan dari Komisi IV DPR. Persetujuan ditandatangani Menteri pada 14 Agustus 2007.

KPK menemukan bukti tiga lembar traveller check senilai Rp 75 juta yang diberikan seorang anggota Komisi IV DPR, bukan Amin, kepada Kristina. Bukti inilah yang ditanyakan kepada Kristina saat diperiksa KPK, Senin.

Dugaan korupsi alih fungsi hutan mangrove di Banyuasin itu merupakan kasus yang sudah lama diselidiki KPK. Kasus ini dilaporkan kepada KPK sebelum Amin ditangkap.

Dalam penggeledahan KPK di Gedung DPR, Senin, KPK menyita dokumen terkait kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan dan dokumen terkait alih fungsi hutan mangrove di Banyuasin.

Dari ruang kerja Amin, misalnya, KPK menyita satu bundel pengeluaran uang Agustus melalui Bank Mandiri, pengeluaran selama musyawarah wilayah PPP, dan berita acara pengkajian dan pembahasan tim terpadu usulan alih fungsi hutan di Bintan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, ada dua jenis dokumen yang disita dari DPR, yakni alat bukti dan barang bukti yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perkara.

Secara terpisah, Ketua KPK Antasari Azhar menambahkan, tim penyidik KPK masih meneliti barang bukti yang diambil dari Gedung DPR. (vin/jos)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup